

PENDIDIKAN BERBASIS MUATAN LOKAL SEBAGAI SUB KOMPONEN KURIKULUM

*Marliana dan Noor Hikmah **

Abstract ;

The introduction of the state of the environment, society, and culture to students enabling them to more to their environment. The introduction and development of the environment through education geared to support the quality of human resources, and ultimately directed to improve the ability of learners. School as a place of education program, a part of the community. Therefore, education programs in schools need to provide extensive knowledge about the specificity of the learners in their environment. Subjects should be made based on local content prepared by the school environment that is tailored to each area. The function of the existence of local content is to broaden the knowledge of students in accordance with the condition of the area. Local content is one of the means for students to develop the knowledge, skills and potential of art owned by the school and the area in which the school is located. Application of local curriculum between one region to another is different. To realize local content -based education at a school needs support with all relevant stakeholders and continuously evaluates to develop the potential of the region. It is not impossible a local charge when packaged in a professional manner will carry the name of the region to national and even international level. Required more in-depth study and togetherness between schools, communities, local governments for the successful implementation of the local content -based education.

Key Words : Pendidikan, Muatan Lokal

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB III pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya pada BAB X pasal 36 ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan

*Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Pendidikan Islam STAIN Samarinda

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat (3) butir c menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Keterampilan/Kejuruan (butir i) dan muatan lokal (butir j).¹

Untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, pemerintah menekankan kurikulum pendidikan muatan lokal. Kurikulum muatan lokal bukan barang baru. Sejak tahun 1987, keberadaannya dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedang pelaksanaannya dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987.

Di era reformasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan, bahwa struktur kurikulum pada setiap satuan pendidikan memuat tiga komponen, yaitu: mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Diprotes dalam Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Implementasinya, Peraturan Mendiknas No. 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen No. 22 dan 23, mulai tahun pelajaran 2006/2007 setiap sekolah diwajibkan menyusun kurikulum sendiri berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).²

Pelaksanaan pendidikan berbasis muatan lokal di sekolah tentu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu secara umum tujuan program pendidikan berbasis muatan lokal adalah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pendidikan di sekolahnya dengan memasukkan kajian materi keunggulan lokal sesuai dengan kondisi dan potensi

¹ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

² E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal.74

sekolah serta lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara khusus pendidikan berbasis muatan lokal bertujuan agar peserta didik :

1. mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya daerah dimana siswa berada;
2. memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai lingkungan daerah yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara;
3. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerah, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
4. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan pemerintah daerah.³

Berdasarkan uraian di atas maka sekolah memiliki kesempatan untuk mengembangkan pendidikan dengan mengakomodir keunggulan lokal sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah serta lingkungannya.

B. KONSEP DASAR MUATAN LOKAL

Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah setempat yang perlu diajarkan kepada siswa.

Pada praktiknya, muatan lokal dipandang merupakan pelajaran kelas nomor dua dan hanya pelengkap. Sekolah-sekolah menerapkannya sebatas formalitas untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang dituangkan dalam berbagai peraturan. Kondisi demikian mengindikasikan aplikasi pengajaran muatan lokal di sekolah masih mengambang.

Muatan lokal di sini dapat diartikan segala potensi dan karya di suatu daerah yang menjadi karakteristik daerah tersebut. Muatan lokal ini juga berarti sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di suatu daerah. Muatan lokal ini merupakan paduan dari pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi aktual di setiap daerah. Sehingga pembelajaran menjadi aktual dan mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Dengan demikian muatan lokal merupakan ciri khas daerah yang dihasilkan dari potensi alam dan potensi

³ Suharsimi Arikunto dan Asnah Said, *Pengembangan Program Muatan Lokal (PPML)*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Peningkatan Mutu Guru Kelas Setara D-II, 1998), hal.75

manusia yang ada di suatu daerah. Muatan lokal inilah yang menjadi bahan untuk terus dikembangkan setiap daerah sehingga menjadi kumpulan potensi yang telah dikembangkan dan menjadi barometer pengembangan daerah setempat.

Pengembangan bidang pendidikan telah menjadi hal penting dalam rancangan pembangunan nasional. Bahwa, keberhasilan pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan sektor lain secara stimulan. Untuk itu, dalam pengembangan ini, sekolah perlu melakukan kajian dengan melibatkan semua stakeholder pendidikan untuk merumuskan bersama tentang muatan lokal yang akan dimasukkan dalam pendidikan berbasis potensi daerah. Sehingga muatan lokal terintegrasi dalam materi belajar yang disusun sesuai jenjang pendidikan siswa. Bahkan jika memungkinkan materi keunggulan lokal menjadi integral dengan kurikulum nasional berciri khas lokal.

Model penyelenggaraan pendidikan yang mempertimbangkan keuntungan geografis dan demografis inilah yang bisa mewujudkan pendidikan nyata. Yaitu pendidikan yang dikelola sesuai kebutuhan lokal masyarakat. Penyesuaian materi dengan kebutuhan lokal dipadukan dalam praktek pendidikan. Sebab, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sosial. Model pendidikan inilah yang diharapkan bisa mengakomodir segala kebutuhan masyarakat. Pendidikan model ini berangkat dari analisis potensi lokal pada setiap daerah yang karakteristiknya berbeda.

Muatan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Sebagai contoh potensi Barito Timur, memiliki potensi seni budaya yang bernilai tinggi. Pemerintah dan masyarakat kota Barito Timur dapat melakukan sejumlah upaya dan program, agar potensi tersebut dapat diangkat menjadi keunggulan lokal Barito Timur sehingga daerah ini menjadi lebih terkenal di kancah nasional.

Konsep pengembangan muatan lokal dapat digali dari berbagai potensi, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya dan historis. Uraian masing-masing sebagai berikut:

- a. Potensi Sumber Daya Alam
- b. Potensi Sumber Daya Manusia
- c. Potensi Budaya

Dalam penyelenggaraan program pendidikan berbasis muatan lokal di sekolah perlu memperhatikan strategi pelaksanaan, identifikasi kondisi dan Kebutuhan daerah, identifikasi potensi satuan pendidikan, identifikasi jenis muatan lokal, dan bagaimana melakukan kerja sama dengan instansi lain.

C. STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERBASIS MUATAN LOKAL DI SEKOLAH

Program Pendidikan Berbasis Muatan Lokal di sekolah merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang tertuang pada PP 19 Tahun 2005 BAB III pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Oleh karena itu pendidikan berbasis muatan lokal dapat diselenggarakan melalui tiga cara, yaitu pengintegrasian dalam mata pelajaran yang relevan, muatan lokal, dan mata pelajaran keterampilan.

1. Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran⁴

Bahan kajian keunggulan lokal dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu yang relevan dengan SK/KD mata pelajaran tersebut. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengkaji SK/KD mata pelajaran yang terkait dihubungkan dengan hasil analisis keunggulan lokal. Hasil pengkajian SK/KD tersebut dituangkan pada penyempurnaan silabus dan RPP. Kemudian dibuat bahan ajar cetak dan bahan ajar ICT yang mengintegrasikan PBKL pada mata pelajaran yang relevan. Pola pengintegrasian PBKL pada mata pelajaran dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini:

⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Prinsip Dan Landasan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Depdikbud, 1988), hal. 25

- 1) Melaksanakan identifikasi SK/KD yang telah ada dihubungkan dengan hasil analisis keunggulan lokal, sehingga terpilih beberapa konsep pada mata pelajaran yang relevan.
- 2) Menyempurnakan Silabus mata pelajaran pada konsep yang terpilih berdasarkan hasil identifikasi SK/KD yang dihubungkan dengan keunggulan lokal.
- 3) Menyempurnakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) setiap mata pelajaran pada SK/KD yang terpilih.
- 4) Membuat bahan ajar (modul, LKS dan lain-lain) atau bahan ajar mata pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan berbasis muatan lokal dan berbasis ICT (*information Communication Technology*).
- 5) Membuat bahan/perangkat ujian dari konsep yang telah terpilih pengintegrasianannya.

2. Mata Pelajaran Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Kajian mata pelajaran muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan. Untuk itu terlebih dahulu harus disusun SK/KD, silabus dan Rencana Pembelajaran yang memungkinkan setiap satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal.

3. Mata Pelajaran Keterampilan.

Strategi ini digunakan untuk menyajikan materi atau substansi muatan lokal secara berdiri sendiri, bukan terintegrasi dengan mata pelajaran. Dengan demikian SK/KD dapat menggunakan mata pelajaran keterampilan sesuai dengan bahan ajar/substansi muatan lokal yang diselenggarakan. Apabila SK/KD yang tersedia tidak relevan dengan bahan ajar/substansi program muatan lokal, maka satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri SK/KD yang sesuai dengan kebutuhan.

4. Identifikasi Kondisi dan Kebutuhan Daerah⁵

Kegiatan identifikasi ini dilakukan untuk mendata dan menelaah berbagai kondisi dan kebutuhan daerah. Data dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait seperti Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha/Industri. Kondisi daerah dapat ditinjau dari potensi daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kekayaan alam. Kebutuhan daerah dapat diketahui antara lain dari:

- a. Rencana pembangunan daerah, termasuk prioritas pembangunan daerah, baik pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, maupun pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- b. Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis-jenis kemampuan dan keterampilan yang diperlukan;
- c. Aspirasi masyarakat mengenai konservasi alam dan pengembangan daerah.

Pengumpulan data untuk identifikasi kondisi dan kebutuhan daerah dapat dilakukan melalui wawancara atau pemberian kuesioner kepada responden. Data yang dikumpulkan oleh sekolah meliputi :

- a. Kondisi sosial (hubungan kemasyarakatan antar-penduduk, kerukunan antarumat beragama)
- b. Kondisi ekonomi (mata pencaharian penduduk, rata-rata penghasilan)
- c. Aspek budaya (etika sopan santun, kesenian daerah, bahasa yang banyak digunakan)
- d. Kekayaan alam (pertambangan, perikanan, perkebunan)
- e. Makanan khas daerah (tempuyak, ikan asin air tawar, wadi)
- f. Prioritas pembangunan daerah (pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, pengentasan kemiskinan)
- g. Kepedulian masyarakat akan konservasi dan pengembangan daerah
- h. Jenis-jenis kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan daerah (sebagai kota jasa, kota perdagangan, dan kota pariwisata), seperti kemampuan berbahasa asing, keterampilan komputer, dan lain-lain.

⁵Ismail, D.A, *Kebijakan pengembangan kurikulum*. Retrieved mei 23, 2013, from www.dedyamrilismail.blogspot.com:<http://dedyamrilismail.blogspot.com>

5. Identifikasi Potensi Satuan Pendidikan⁶

Kondisi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di berbagai daerah sangat bervariasi. Oleh karena itu, untuk menentukan program PBKL yang akan dilaksanakan, setiap satuan pendidikan harus melakukan identifikasi terhadap potensi masing-masing. Kegiatan ini dilakukan untuk mendata dan menganalisis daya dukung yang dimiliki. Kegiatan yang dilaksanakan adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ditekankan pada kebutuhan peserta didik yang harus diperhatikan:

- a. lingkungan, sarana dan prasarana,
- b. ketersediaan sumber dana,
- c. sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik),
- d. dukungan Komite Sekolah dan masyarakat setempat,
- e. dukungan unsur lain seperti dunia usaha/industri,
- f. kemungkinan perkembangan sekolah.

6. Identifikasi Jenis Keunggulan Lokal ⁷

Berdasarkan kajian beberapa sumber, maka dapat dipilih/ditentukan jenis program keunggulan lokal yang memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi pendidik dari satuan pendidikan. Penentuan jenis muatan lokal didasarkan pada kriteria berikut:

- a. kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik (fisik, psikis, dan sosial)
- b. ketersediaan pendidik yang diperlukan
- c. ketersediaan sarana dan prasarana
- d. ketersediaan sumber dana
- e. tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa
- f. tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan
- g. diperlukan oleh lingkungan sekitar.

⁶ Ibrahim dan Beny Karyadi, *Pengembangan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Peningkatan Mutu Guru Kelas SD Setara D-II, 1991), hal.38

⁷Rusman, *Manajemen Kurikulum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.29

7. Kerjasama dengan Unsur Lain⁸

Pengembangan program pendidikan berbasis muatan lokal di sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus mempersiapkan berbagai hal untuk memperlancar pengembangan keunggulan Lokal yang akan dilaksanakan pada satuan pendidikan masing-masing. Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam menentukan program pendidikan berbasis muatan lokal yang akan dilaksanakan. Tim pengembang kurikulum yang sudah dibentuk di setiap satuan pendidikan, bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan berbasis muatan lokal. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan pula masukan dari guru yang akan mengampu mata pelajaran Muatan Lokal, Keterampilan atau mata pelajaran lain yang relevan. Di samping itu, satuan pendidikan perlu menjalin kerjasama dengan unsur-unsur lain, seperti Tim Pengembang Kurikulum tingkat Provinsi/ Kabupaten, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lain misalnya dunia usaha/industri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Dinas lain yang terkait. Dalam kerjasama ini masing-masing unsur memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab tertentu.

- a. Peran, tugas, dan tanggung jawab tim pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam pengembangan pendidikan berbasis muatan lokal secara umum adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
 - 2) Mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di satuan pendidikan;
 - 3) Mengidentifikasi jenis keunggulan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik dan satuan pendidikan;
 - 4) Menentukan jenis program PBKL yang akan dilaksanakan;
 - 5) Menyusun SK, KD dan Silabus Muatan Lokal dan mata pelajaran Keterampilan apabila SK/KD yang ada tidak relevan.
- b. Peran Tim Pengembang Kurikulum tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah memberikan bimbingan teknis dalam:
 - 1) mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;

⁸Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal.17

- 2) mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di satuan pendidikan;
 - 3) mengidentifikasi jenis program PBKL yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik dan satuan pendidikan;
 - 4) menentukan jenis dan prioritas program yang akan dilaksanakan;
 - 5) menyusun SK, KD, dan Silabus Muatan Lokal dan mata pelajaran keterampilan;
 - 6) memilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan jenis program;
 - 7) mengembangkan penilaian yang tepat untuk program pendidikan berbasis muatan lokal yang dilaksanakan.
- c. Peran pemerintah daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota secara umum adalah:
- 1) memberi informasi mengenai potensi daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia di wilayah lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, serta prioritas pembangunan daerah di berbagai sektor yang dikaitkan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - 2) memberi gambaran mengenai kemampuan dan keterampilan yang diperlukan pada sektor-sektor tertentu;
 - 3) memberi sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan bantuan dalam menentukan prioritas program pendidikan berbasis muatan lokal sesuai dengan nilai-nilai dan norma setempat.
- d. Peran instansi/lembaga lain seperti dunia usaha/industri, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah dan Dinas terkait secara umum adalah:
- 1) memberi informasi mengenai kompetensi yang harus dikuasai peserta didik untuk PBKL yang diprogramkan;
 - 2) memberi masukan dan atau contoh SK, KD, dan silabus yang dapat diadaptasi untuk muatan lokal dan keterampilan di sekolah;
 - 3) memberi fasilitas kepada peserta didik untuk berkunjung/belajar/praktik di tempat tersebut guna memantapkan kemampuan/keterampilan yang didapat dalam program pendidikan berbasis muatan lokal.

7. Pelaksanaan Penilaian Program Pendidikan Berbasis Muatan Lokal⁹

Penilaian bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik pada setiap Kompetensi Dasar (KD). Penilaian ini mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan jenis keunggulan lokal yang dilaksanakan oleh sekolah. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk menentukan peserta didik yang boleh melanjutkan ke materi pelajaran berikutnya dan peserta didik yang perlu mendapat layanan perbaikan/remedial.

Pelaksanaan Penilaian Program Pembelajaran pendidikan berbasis muatan lokal disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran pendidikan keunggulan lokal yang dilaksanakan sebagai berikut, apabila:

- a. terintegrasi dalam mata pelajaran, maka penilaiannya menyatu dengan SK dan KD mata pelajaran yang terkait.
- b. menjadi mata pelajaran keterampilan, maka penilaiannya dilakukan secara mandiri sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan.
- c. menjadi muatan lokal, maka penilaiannya dilakukan secara mandiri sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan, sama halnya seperti pada mata pelajaran keterampilan.

Penilaian hasil belajar peserta didik harus mendorong peserta didik untuk belajar yang lebih baik. Prinsip penilaian yang digunakan adalah seperti berikut ini.

- a. Sahih, yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, yakni penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran.

⁹ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.28

- e. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- g. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.

Dengan memperkuat mata pelajaran keterampilan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat ini akan bisa meningkatkan daya eksistensi sekolah di sebuah daerah. Sebab, minat masyarakat untuk berpendidikan akan meningkat dan secara otomatis pengakuan masyarakat terhadap keberadaan pendidikan tersebut akan semakin tinggi. Dengan berbekal mutli skill maka siswa akan cepat diterima masyarakat, karena keterampilan yang dimiliki bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, model pembelajaran sekolah berbasis keunggulan lokal ini harus banyak dilakukan dalam bentuk praktek dan bekerjasama dengan dunia usaha.

Salah satu ukuran keberhasilan sekolah adalah output lembaga pendidikan yang terampil dan diterima masyarakat sesuai keahlian yang didapat di lembaga pendidikan. Dengan demikian, model sekolah berbasis muatan lokal menjadi penting untuk direalisasikan dan dikembangkan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Selain untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hidup juga meningkatkan daya eksistensi sekolah di daerah.

8. Pengembangan Muatan Lokal

Pengembangan muatan lokal Landasan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- b. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan¹¹

¹⁰ Junaidi, Wawan (2013, mei 21) *Proses Pengembangan Kurikulum*. <http://wawan-junaidi.blogspot.com>

¹¹ Anonim, 2008. Permendiknas No.19 Tahun 2008 *tentang Standar Nasional Pendidikan*. Depdiknas. Jakarta

- d. Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi
- e. Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- f. Permendiknas No. 24/2006 dan No. 6/2007 tentang pelaksanaan
- g. Permendiknas No. 22 dan 23/2006
- h. Permendiknas No. 41 Thn 2007 tentang Standar Proses
- i. Permendiknas No. 24 Thn 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
- j. Permendiknas No. 19 Thn 2007 tentang Standar Pengelolaan
- k. Permendiknas No. 20 Thn 2007 Standar Penilaian Pendidikan

Selain itu juga tingkat kemampuan berpikir anak dari konkrit ke abstrak dan tingkat rasa penasaran insting anak menjadi dasar pengembangan muatan lokal. Keanekaragaman budaya juga merupakan dasar pengembangan muatan lokal, karena Indonesia mempunyai beragam budaya bangsa yang semuanya mempunyai corak khusus dan khas.

9. Mengapa Muatan Lokal Diperlukan ?

Mengacu pada judul tersebut, muatan lokal pasti sangat diperlukan, apalagi untuk kemajuan daerah yang otomatis berdampak baik bagi kemajuan nasional, untuk itu muatan lokal sangat diperlukan sebagai bentuk pengembangan tersebut. Ditinjau dari subyek penerima muatan lokal, muatan lokal sangat diperlukan, secara nasional muatan lokal diperlukan untuk:

- a. Pelestarian budaya
- b. Pengembangan kebudayaan
- c. Perubahan sikap lingkungan terhadap lingkungan

Dilihat dari kewajiban sekolah muatan lokal harus diberikan karena:

- a. Sebagai tanggung jawab sekolah
- b. Memberikan pendidikan lingkungan
- c. Memenuhi kebutuhan murid dan pembangunan masyarakat

Ditinjau dari sudut murid (peserta didik) muatan lokal diberikan karena:

- a. Mengakrabkan murid dengan lingkungan
- b. Melatih murid berpikir analitis
- c. Dapat mengembangkan potensi murid

D. PENUTUP

Pengenalan keadaan lingkungan, sosial, dan budaya kepada peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Sekolah sebagai tempat program pendidikan, merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Sehingga perlulah disusun mata pelajaran yang berbasis pada muatan lokal yang disusun oleh sekolah yang disesuaikan dengan lingkungan daerah masing-masing.

Fungsi dari adanya muatan lokal yaitu untuk memperluas pengetahuan siswa sesuai dengan kondisi daerahnya. Muatan lokal merupakan salah satu sarana untuk siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan seni yang dimiliki oleh potensi daerah masing-masing. Penerapan kulikuler muatan lokal antara satu daerah dengan daerah lain berbeda.

Untuk mewujudkan pendidikan berbasis muatan lokal pada suatu sekolah diperlukan kerjasama dengan semua pihak terkait dan secara terus menerus melakukan evaluasi untuk mengembangkan potensi daerah. Bukan tidak mustahil sebuah muatan lokal jika dikemas secara profesional akan mengangkat nama daerah ke tingkat nasional bahkan internasional.

Diperlukan kajian yang lebih mendalam dan kebersamaan antara sekolah, masyarakat, pemerintah daerah untuk keberhasilan pelaksanaan pendidikan berbasis muatan lokal.

BIBLIOGRAFI

- Anonim, 2008. Permendiknas No.19 Tahun 2008 *tentang Standar Nasional Pendidikan*. Depdiknas. Jakarta
- Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Arikunto, Suharsimi., dan Said, Asnah,. *Pengembangan Program Muatan Lokal (PPML)*. Jakarta:

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Peningkatan Mutu Guru Kelas Setara D-II, 1998
- Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004
- E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Ibrahim dan Beny Karyadi, *Pengembangan Inovasi Kurikulum*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Peningkatan Mutu Guru Kelas SD Setara D-II, 1991
- Idi, Abdullah., *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Ismail, D.A., *Kebijakan pengembangankurikulum*. Retrieved mei 23, 2013, from www.dedyamrilismail.blogspot.com: <http://dedyamrilismail.blogspot.com>
- Junaidi, Wawan (2013, mei 21) *Proses Pengembangan Kurikulum*. <http://wawan-junaidi.blogspot.com>
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Sukmadinata, Nana Syaodih., *Prinsip Dan Landasan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Depdikbud, 1988